

## WACANA DAN STIGMA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Alfarabi

Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu  
Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu

### Abstrak

Etnis Tionghoa merupakan suku bangsa di wilayah negara Indonesia yang sering menjadi sasaran kerusuhan massa yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Dari berbagai kasus yang terjadi seperti peristiwa 1946, Malari 1974, dan terakhir Mei 1998 menyisakan pertanyaan tentang mengapa etnis Tionghoa menjadi sasaran dari kekecewaan masyarakat tersebut. Dari beberapa kajian ternyata terdapat wacana yang berkembang di masyarakat terhadap keberadaan etnis Tionghoa. Wacana etnis Tionghoa adalah pendatang di wilayah Indonesia, binatang ekonomi, dan eksklusif, sepertinya diterima sebagai sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat.

Menggunakan pendekatan Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan serta meminjam konsep hegemoni Gramsci ditemukan bahwa wacana tentang etnis Tionghoa merupakan produk dari penguasa yang gagal membina hubungan antar etnis. Wacana yang dibentuk oleh pemerintah ini menghegemoni masyarakat sehingga diterima sebagai sesuatu yang umum. Selain itu juga didapatkan bahwa produk wacana pemerintah terhadap etnis Tionghoa merupakan warisan wacana dari pemerintahan kolonial Belanda.

**Kata Kunci:** Tionghoa, wacana, kekuasaan, pemerintah, hegemoni.

### Pendahuluan

Di Indonesia menurut Geertz ada lebih dari 300 suku bangsa<sup>1</sup> Penyebab mengapa begitu banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia bisa dilihat dari pulau<sup>2</sup> yang tersebar dari timur ke barat dengan jumlah 3000 pulau. Letaknya yang tersebar membuat ketika nenek moyang yang datang dari Tionghoa selatan berada dalam wilayah yang terpisah-pisah dan terisolasi dari masyarakat yang lain. Hal ini mengakibatkan setiap masyarakat tersebut melakukan dan mengembangkan budayanya sendiri-sendiri berdasarkan ikatan emosional dan menganggap mereka merupakan jenis sendiri<sup>2</sup>. Masyarakat inilah yang lama-kelamaan menjadi suku bangsa dengan nilai-nilai berbeda satu sama lain sesuai dengan kepercayaan dan mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat.

Kemajemukan masyarakat Indonesia secara suku bangsa, agama, dan regional wilayah merupakan dimensi horizontal struktur bangsa Indonesia. Sedangkan secara vertikal dilihat dari stratifikasi masyarakat berdasarkan kekuatan politik dan ekonomi, dimana sebagian besar orang yang secara ekonomis dan politis berposisi lemah di posisi bawah, dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas<sup>3</sup>. Salah satu dari sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berada pada lapisan atas adalah etnis Tionghoa.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, regional dan stratifikasi sosial di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Maka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) merupakan bahaya latent bagi keutuhan bangsa Indonesia. Adanya konflik yang berbau SARA mengindikasikan bahwa bahaya latent akan kemajemukan bangsa Indonesia masih terus mengancam integrasi bangsa Indonesia, oleh karena itu mengeliminir konflik SARA di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan yang harus terus dijawab.



Dari berbagai konflik yang berbau SARA di Indonesia, yang menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu tentang konflik yang melibatkan etnis Tionghoa. Walaupun etnis ini sudah berdiam lama di Indonesia, namun penerimaan masyarakat terhadap etnis ini belum sepenuhnya mengakui mereka sebagai bagian dari pribumi. Padahal etnis lain seperti Arab dan India<sup>3</sup> sudah lama berbaur dan menjadi bagian masyarakat Indonesia. Sampai saat ini masih saja berkembang anggapan orang Tionghoa sebagai perantau, orang yang menumpang hidup dan cari makan di negeri orang. Orang Tionghoa juga menyandang label WNI lengkap dengan berbagai atribusi yang cenderung berkonotasi kurang menyenangkan. Diibaratkan orang Tionghoa hanya diterima di beranda depan rumah dan belum diterima di dalam rumah sebagai keluarga sendiri<sup>4</sup>.

Akibat masih dianggap sebagai pendatang, etnis Tionghoa sering menjadi sasaran dalam berbagai pergolakan politik di Indonesia, walaupun mereka tidak terlibat langsung. Sebagai korban dari konflik horizontal maupun vertikal, etnis Tionghoa relatif mengalami hal yang sama diseluruh daerah di Indonesia. Contohnya adalah peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Menurut Lan (1998) peristiwa 1965 merupakan trauma paling berat bagi orang Tionghoa di Indonesia. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan pada era pasca kerusuhan Mei 1998, Bachrun dan Hartanto (2000) menyimpulkan telah terjadi krisis identitas di kalangan orang Tionghoa<sup>5</sup>. Bahkan dalam miniatur Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, etnis Tionghoa adalah salah satu etnis minoritas yang ditafikan keberadaannya oleh pemerintahan Soeharto<sup>6</sup>.

Apa yang sebenarnya menjadi wacana bagi identitas Tionghoa di Indonesia sehingga keberadaan mereka sering menjadi korban dari konflik yang terjadi di negeri ini menjadi sebuah pertanyaan, mengingat ruang gerak masyarakat Tionghoa yang relatif terbatas pada bidang tertentu saja, membuat komunitas ini begitu mudah dilabelkan. Kuantitas mereka yang kecil juga sering menjadi korban dari kebijakan pemerintah mulai dari identitas diri, agama dan budaya. Dari sini terlihat bagaimana komunitas kecil yang sudah lama berdiam di wilayah Indonesia ini selalu mengalami diskriminasi dan penindasan terhadap eksistensi mereka. Jika dengan etnis lain mereka mengalami tekanan sosial dan sering menjadi korban dari berbagai konflik, maka dengan pemerintah mereka mengalami kebijakan yang diskriminatif.

Tulisan ini bermaksud mengungkap wacana dibalik komunitas Tionghoa di Indonesia sehingga keberadaannya sering menjadi korban dari konflik dan kebijakan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam membongkar wacana ini adalah dengan menggunakan konsep Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan, serta konsep hegemoni Gramsci untuk melihat proses penyebaran wacana dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk membongkar secara holistic wacana yang berkembang di masyarakat tentang etnis Tionghoa yang dilihat dalam dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Selanjutnya mencari aktor-aktor yang memproduksi wacana serta bagaimana proses stigma dan wacana tersebut berada dalam kehidupan masyarakat.

Sementara keutamaan dari tulisan ini, bahwa berbagai konflik SARA yang terjadi di wilayah Indonesia baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Konflik Ambon, Poso, Aceh, Sampit, dan perang suku di tanah Papua merupakan contoh bagaimana pluralitas juga menyimpan potensi konflik latent yang dapat meledak sewaktu-waktu. Kerusuhan Mei 1998 juga banyak ditenggarai menimbulkan korban jiwa dari suku Tionghoa yang tidak sedikit akibat ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi.

Dengan mengetahui wacana apa yang hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat tentang etnis diluar komunitas mereka, maka diharapkan ada kebijakan yang dapat diambil untuk menanggulangi tekanan dan penindasan terhadap etnis-etnis



tertentu. Dengan begitu konflik-konflik laten dapat dicegah secara dini serta kehidupan masyarakat culturalisme dapat berlangsung di negara Indonesia.

### Wacana Tentang Etnis Tionghoa

Ada beberapa wacana yang selama ini hidup dalam pemikiran masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Sebuah anggapan yang terus hidup dan diyakini sebagai karakteristik etnis Tionghoa. Wacana yang diyakini ini seolah-olah dianggap sebagai suatu yang alami dalam mendefinisikan identitas etnis Tionghoa. Namun jika diteliti ternyata wacana yang berkembang selama ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, namun ada sejarah panjang yang memungkinkan wacana tentang etnis Tionghoa hidup sampai sekarang. Beberapa wacana tentang etnis Tionghoa tersebut antara lain akan diuraikan berikut ini.

Pertama adalah bahwa etnis Tionghoa bukan bagian dari etnis yang ada di Indonesia. Walaupun keberadaan etnis Tionghoa sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri, namun keberadaan etnis Tionghoa masih dianggap pendatang dan identik dengan bangsa Tiongkok dibandingkan bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsep tentang pribumi yang berarti mempunyai daerah sendiri dalam kesatuan negara Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Leo Suryadinata<sup>7</sup>. Nasionalisme Indonesia dikonstruksi berdasarkan konsep 'kepribumian' (*indigenism*), dan etnik Tionghoa dikategorikan sebagai orang asing atau *Vreemde Oosterlingen* (*Foreign Oriental*) yang dianggap bukan merupakan bagian dari nation Indonesia<sup>8</sup>. Etnik Tionghoa dianggap sebagai non pribumi dan pendatang baru yang tidak bisa diterima sebagai sukubangsa Indonesia sebelum mereka mengasimilasi diri<sup>9</sup>.

Yang kedua adalah wacana tentang keberadaan etnis Tionghoa yang cenderung menutup diri dan bergaya eksklusif. Hal ini diperkuat dengan daerah pemukiman Tionghoa yang terpusat pada suatu daerah yang disebut dengan Pecinan.

Yang ketiga adalah wacana tentang etnis Tionghoa di bidang ekonomi, wacana dibidang ini cukup kompleks sehingga sering menjadi sasaran dalam setiap kerusuhan di Indonesia. Wacana ekonomi juga menempatkan Tionghoa berada dalam lapisan atas dalam struktur ekonomi di Indonesia karena kedekatannya dengan kekuasaan dan menguasai perdagangan di Indonesia. Persepsi tersebut menjadi penilaian tunggal atas keberadaan mereka sebagai masyarakat yang sebenarnya juga dekat dengan masalah-masalah sosial, misalnya kemiskinan<sup>10</sup>.

Untuk membongkar ketiga wacana tersebut digunakan pendekatan Foucault mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Wacana disini tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi mengikuti Foucault adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (gagasan, konsep atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak<sup>11</sup>.

Dalam kurun waktu yang cukup lama dan menyebar di seluruh bagian Indonesia, tentulah diperlukan kekuatan besar untuk menyebarkan wacana tentang etnis Tionghoa. Oleh karena itu untuk membongkar bagaimana wacana tentang etnis Tionghoa ini terus ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia maka digunakan pendekatan Gramsci tentang hegemoni<sup>12</sup>. Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Karena pengalaman sosial kelompok subordinat (apakah oleh kelas, gender, ras, umur dan sebagainya) berbeda dengan ideologi kelompok dominant. Oleh karena itu, perlu usaha bagi kelompok dominan untuk menyebarkan ideologi dan kebenaran tersebut agar diterima, tanpa



perlawanan. Salah satu strategi dalam hegemoni adalah nalar awam (*common sense*). Jika ide atau gagasan dari kelompok dominan/berkuasa diterima sebagai sesuatu yang *common sense* (jadi tidak didasarkan pada kelas sosial), kemudian ideologi itu diterima, maka hegemoni telah terjadi<sup>13</sup>. Teori ideologi menekankan bahwa semua teks dan semua makna mempunyai dimensi sosial politik dan tidak dapat dimengerti kalau tidak menyertakan dimensi konteks sosialnya. Kerja ideologi, sebagaimana dinyatakan Fiske, selalu mendukung *status quo*, melalui mana kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih besar menyebarkan gagasan dan pesannya. Bagi Fiske, semua teori ideologi sepakat bahwa ideologi bekerja untuk dominasi kelas, perbedaannya hanya pada cara bagaimana dominasi itu bekerja, dan tingkat efektivitasnya<sup>14</sup>.

### Wacana Tentang Tionghoa Merupakan Produksi dari Penguasa

Dari beberapa teks diatas didapat bahwa persoalan wacana tentang Tionghoa bukanlah suatu yang datang dengan sendirinya, melainkan karena beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap kehidupan etnis Tionghoa. Hal ini memperkuat dugaan bahwa wacana tentang etnis Tionghoa merupakan warisan dari kolonial, Orde Lama dan Orde Baru. Yang menarik adalah wacana tentang etnis Tionghoa sepetinya langgeng dan menerima restu dari pemerintahan. Dari beberapa era pemerintahan wacana tentang etnis Tionghoa terus bertahan dan hidup ditengah masyarakat. Walaupun dalam beberapa hal etnis Tionghoa juga turut berjasa dalam beberapa bidang yang membawa nama harum bangsa Indonesia<sup>15</sup>, namun hal tersebut terpinggirkan karena kalah dengan wacana dominan. Menurut Foucault, Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominant, sedangkan wacana-wacana lainnya akan "terpinggirkan" (*marginalized*) atau "terpendam" (*submerged*)<sup>16</sup>.

Realitas dipahami di sini sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Realitas itu sendiri, menurut Foucault, tidak bisa didefinisikan jika kita tidak mempunyai akses dengan pembentukan struktur diskursif tersebut. Menurut Foucault, pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif; wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar<sup>17</sup>. Dalam bahasa Macdonell, wacana itu merupakan suatu area di mana khalayak berpikir dengan jalan tertentu, bukan yang lain. Wacana membatasi bidang pandangan kita, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan<sup>18</sup>.

Wacana tentang Tionghoa ini berlangsung secara hegemoni, dimana prosesnya bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominant, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Ada suatu nilai atau consensus yang dianggap memang benar, sehingga ketika ada cara pandang atau wacana lain dianggap sebagai tidak benar. Media di sini secara tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi consensus bersama. Sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang<sup>19</sup>.

Keberadaan etnis Tionghoa yang masih dianggap orang asing atau pendatang di Indonesia ternyata merupakan ketidakmampuan pemerintah orde lama dalam menyelesaikan status kewarganegaraan pasca kemerdekaan. Ketidaktegasan pemerintah membuat kebingungan etnis Tionghoa dalam menentukan identitas kewarganegaraan mereka. Sehingga dalam beberapa kebijakan pemerintah, kadang mereka masih dianggap



warga negara asing dan mengalami diskriminasi sebagai warga negara Indonesia. Ketidakmampuan ini akhirnya diterjemahkan secara sembarangan oleh perangkat yang berada dibawahnya. Kebijakan sistem benteng mengakibatkan terjadinya pengusiran besar-besaran etnis Tionghoa dari daerah-daerah pedalaman. Sistem benteng sendiri digunakan untuk melindungi pengusaha pribumi dari pengusaha asing, dengan pengusiran etnis Tionghoa dari desa-desa pedalaman maka wacana yang ditangkap pada masa itu Tionghoa bukanlah bagian dari masyarakat Indonesia. Wacana ini tidak diluruskan oleh pemerintahan orde lama dengan memberikan hak yang sama pada etnis Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia sesuai UU kewarganegaraan 1946.

Wacana tentang kehidupan orang-orang Tionghoa yang eksklusif dan memisahkan diri dari kehidupan masyarakat sekitar merupakan pengaruh dari kebijakan kolonial yang tidak ingin adanya solidaritas antar etnis<sup>20</sup>, sehingga dibangun perkampungan terpisah. Pusat pemukiman Tionghoa yang disebut pecinan merupakan salah satu warisan dari kebijakan kolonial Belanda ini. Jadi bukan suatu alasan yang disengaja jika pusat pemukiman ini dianggap sebagai salah indikator dari pemisahan orang-orang Tionghoa dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya anggapan keterlibatan etnis Tionghoa dalam pergerakan PKI membuat etnis Tionghoa di jauhi oleh masyarakat<sup>21</sup>, sehingga untuk mempertahankan hidup, mereka makin menguatkan hubungan antar sesama etnis mereka. Tentu hal ini juga sebagai faktor pendorong bagaimana pada akhirnya interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lain menjadi makin terbatas. Dari berbagai peristiwa tersebut label eksklusif dan menutup diri disematkan pada etnis Tionghoa di Indonesia. Wacana tentang eksklusif dan anggapan keterlibatan dalam G 30 S/PKI membuat etnis Tionghoa mengalami diskriminasi. Wacana anti Tionghoa sering dikumandangkan sebagai bentuk kebencian yang lalu di luapkan dalam bentuk penghancuran simbol-simbol kekuasaan Tionghoa yang notabene milik etnis Tionghoa.

Di Bidang ekonomi banyak faktor yang membuat etnis Tionghoa berkecimpung ke dalam perdagangan. Dimasa awal kedatangan orang Tionghoa di Indonesia sampai masa kolonial, berdagang merupakan pilihan yang diambil etnis Tionghoa karena tidak punya lahan. Walaupun diasal negaranya mereka merupakan petani. Dimasa pasca kemerdekaan dan orde lama, etnis Tionghoa mulai dapat beraktifitas dalam berbagai bidang termasuk politik selain berdagang. Namun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan etnis Tionghoa sebagai warga negara masih belum sepenuhnya, orang-orang Tionghoa masih dianggap pendatang dan dianggap membahayakan ekonomi masyarakat pribumi. Sehingga kebijakan sistem benteng mengusir etnis Tionghoa dari daerah-daerah. Praktis kehidupan masyarakat Tionghoa hanya berkisar pada ibukota daerah tingkat 1 dan 2 yang notabene lahannya terbatas. Dalam kondisi seperti itu berdagang menjadi pilihan untuk mempertahankan hidup.

Sedangkan dimasa orde baru, pilihan kehidupan masyarakat Tionghoa hanya terbatas pada ekonomi, hal ini karena peristiwa G 30 S/PKI telah menempatkan Tionghoa sebagai etnis yang dianggap berbahaya karena terlibat dalam gerakan yang terlarang tersebut, Sehingga aktifitas etnis Tionghoa selain ekonomi di larang. Apalagi politik *spacegating* yang diterapkan pemerintah orde baru membuka jalan bagi orang-orang Tionghoa untuk terlibat langsung dalam bidang ekonomi. Dari berbagai peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa pilihan etnis Tionghoa dalam berdagang lebih disebabkan pada pilihan politis ketimbang keuntungan ekonomi. Wacana tentang etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang dibuat dengan sengaja oleh pemerintahan yang ada di Indonesia baik dalam kebijakan maupun dalam ungkapan pelabelan. Ada relasi kekuasaan yang bermain yang diterapkan melalui hegemoni sehingga wacana tersebut tersebar di masyarakat dan dapat hidup sampai sekarang.



### Kesimpulan

Sentimen negatif dan phobia terhadap etnis Tionghoa ternyata tidak lepas dari konteks dan konstruksi kebijakan negara. Wacana digunakan negara untuk men-stigma, stereotype, dan prasangka terhadap etnis Tionghoa. Melalui media bahasa wacana tentang etnis Tionghoa dibentuk. Kerusuhan yang sering terjadi dan menempatkan etnis Tionghoa sebagai korban merupakan hasil warisan wacana pemerintahan yang gagal dalam mengelola relasi antar etnis.

Wacana tentang etnis Tionghoa merupakan konsep yang diproduksi oleh penguasa untuk kepentingan mereka sendiri. Dizaman Kolonial, politik adu domba menjadi strategi yang diterapkan penjajah agar tidak adanya solidaritas diantara etnis, budaya kecurigaan antar etnis dipelihara oleh penguasa agar tidak terjadi interaksi yang intens. Dizaman penguasa orde lama, isu kewarganegaraan menjadi wacana untuk menunjukkan keberpihakan penguasa terhadap rakyat kecil. Sedangkan di zaman orde baru, politik *spacegating* merupakan strategi pemerintah untuk menunjukkan biang kerok dari kegagalan Negara dalam mengentaskan kemiskinan. Wacana yang diproduksi oleh penguasa ini disebarkan dalam kehidupan masyarakat melalui cara hegemoni.

Wacana yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia sangat terkait dengan nuansa kebijakan politik penguasa, dimana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menempatkan etnis Tionghoa sesuai dengan kemauan politiknya. Posisi minoritas yang cenderung rentan, selalu memojokkan etnis Tionghoa dari waktu ke waktu.

### Endnote

- <sup>1</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali, 1992, hal 36.
- <sup>2</sup> ibid hal 35
- <sup>3</sup> Arab dan India merupakan suku bangsa yang digolongkan oleh kolonial sebagai Timur Asing dan mengalami proses pemilihan warga Negara pasja kemerdekaan.
- <sup>4</sup> DP Budi Susetyo, *Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia*. Blog serba-serbi, 2009
- <sup>5</sup> DP Budi Susetyo, *Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia*. Susetyo lebih suka menggunakan istilah Tionghoa untuk menunjukan keberadaan etnis tionghoa.
- <sup>6</sup> Alegori Goenawan Mohammad dikutip Mudji Sutrisno dalam *Menafsir Keindonesiaan . Hermeneutika Pascakolonial ; Soal Identitas* Kanisius, Yogyakarta, 2004
- <sup>7</sup> Leo Suryadinata, *Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran Negara, Sejarah, dan Budaya dalam Hubungan antaretnis*, Institute of Southeast Asian Studies, Antropologi Indonesia, 2003.
- <sup>8</sup> Ibid
- <sup>9</sup> Co Ibid
- <sup>10</sup> Franditya Utomo, *Term of Reference (TOR) Diskusi Terbuka "Identitas Dan Feminisasi Kemiskinan Perempuan Tionghoa Surabaya"* 2008
- <sup>11</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana; pengantar analisis teks media*, LKiS, Yogyakarta, 2001.
- <sup>12</sup> Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, nilai dan kepercayaan dapat ditularkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi dan indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela ideologi hegemonik itu menyatu dan tersebar dalam praktik, kehidupan, persepsi dan pandangan dunia sebagai sesuatu yang dilakukan dan dihayati secara sukarela.
- <sup>13</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana; pengantar analisis teks media*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal 107.
- <sup>14</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana; pengantar analisis teks media*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal 108.
- <sup>15</sup> Menurut saya beberapa tokoh Tionghoa seperti Liem Swie King, Kwik Kian Gie, Kho Ping Hoo, Susi Susanti turut berjasa dalam mengangkat derajat bangsa Indonesia



- <sup>16</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana; pengantar analisis teks media*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal 77
- <sup>17</sup> Ibid hal 73
- <sup>18</sup> Ibid hal 74
- <sup>19</sup> Ibid hal 104-105
- <sup>20</sup> Sewaktu datang di Indonesia, Belanda menghadapi perlawanan yang sengit dari masyarakat Indonesia. Waktu itu kelompok masyarakat Tionghoa bersama dengan masyarakat pribumi melakukan perlawanan. Belanda kemudian membuat siasat untuk memecah belah kekuatan yang sudah ada. Caranya, memisahkan antara pribumi dan Tionghoa itu dengan berbagai aturan menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi. Batas etnik diperjelas. Dan akhirnya, kekuatan ini memang pecah. <http://www.singkawang-online.co.cc>
- <sup>21</sup> Sekitar tahun 60-an, setelah pemberontakan PKI, Tionghoa dicurigai, dan kemudian dibatasi. Gerakan masyarakat Tionghoa terus dipantau dan dikontrol. Kondisi ini membuat masyarakat pribumi menutup diri terhadap masyarakat Tionghoa. Hasilnya, karena komunikasi kurang terjalin, pengetahuan tentang budaya masyarakat perantauan ini juga jadi kurang. Akibatnya, pengetahuan awam mengenai orang Tionghoa lebih berlandaskan praduga-praduga (stereotipe). <http://www.singkawang-online.co.cc>

## DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto 2001, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS, Yogyakarta
- Kinasih Ayu Windy, 2007. *Identitas Etnis Tionghoa Di Kota Solo*. Lab JIP FISIP, UGM
- Nasikun, 1992, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : CV
- Suryadinata Leo, 2003, *Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran Negara, Sejarah, dan Budaya dalam Hubungan Antaretnis*. Institute of Southeast Asian Studies. Antropologi Indonesia
- Sutrisno Mudji, Hendar Putranto, 2004, *Hermeneutika Pascakolonial ; Soal Identitas*. Kanisius ,Yogyakarta

## MAKALAH DAN AKSES INTERNET

- Utomo Franditya, 2008, Term of Reference (TOR) Diskusi Terbuka "Identitas Dan Feminisasi Kemiskinan Perempuan Tionghoa Surabaya"
- Sartini Ni Wayan, *Konsep Dan Nilai Kehidupan Masyarakat Tionghoa Analisis Wacana Ritual Tahun Baru Imlek*
- Susetyo DP Budi, *Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia*  
<http://www.singkawang-online.co.cc> -
- Tomy, *Koruptor BLBI dan Stigma bagi Tionghoa*, Blog serba-serbi, 2007 Imam Cahyono, *Menepis Stigma, Memupus Prasangka*, Jakarta
- Joehanes Budiman, *Permasalahan Etnis Tionghoa di Indonesia* June 10th, 2008